

PKN

BAB 1 PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Rumusan dasar negara

M. Yamin tanggal 29 Mei 1945:

1. Perikebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Soepomo 31 Mei 1945:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Keadilan rakyat
5. Musyawarah

Soekarno 1 Juni 1945:

1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Hasil sidang PPKI

1. Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Menetapkan UUD 1945

3. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden

4. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

Jadi, setiap warga negara hendaknya memiliki semangat patriotisme yang dilandasi oleh sikap nasionalisme. Sebagai seorang pelajar, hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengikuti upacara bendera dan belajar dengan giat.

BAB 2 NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

A. Sanksi

Agar norma dapat berjalan dengan baik, masyarakat menciptakan sanksi yang digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang sehingga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang dibuat ada 2 jenis, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif biasanya berupa pujian, sebagai motivasi bagi seseorang untuk tidak melanggar aturan. Sedangkan, sanksi negatif sindiran, ejekan, atau hukuman, yang bisa membuat seseorang merasa rendah diri. Sanksi negatif diberikan jika seseorang melanggar aturan yang berlaku.

B. Macam-macam norma

1. Norma agama

Sumber: Tuhan Yang Maha Esa

Sifat: Universal

Tujuan: Menciptakan keimanan dan ketakwaan dalam diri manusia

Sanksi: Tidak langsung/di akhirat (Dosa)

2. Norma kesusilaan

Sumber: Hati nurani

Tujuan: Memiliki rasa kesusilaan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat

Kegunaan: Mengendalikan tutur kata, sikap dan perilaku individu melalui teguran hati nurani

Sanksi: Penyesalan

3. Norma kesopanan

Sumber: Masyarakat

Sifat: Lokal

Tujuan: Menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

Kegunaan: Mengatur kehidupan antar manusia dalam berinteraksi antar sesama

Sanksi: Dicemooh, ditegur, atau dikucilkan

4. Norma hukum

Sumber: Negara

Sifat: Lokal

Tujuan: Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum

Kegunaan: Melindungi hak dan kewajiban

Sanksi: Hukuman dan memaksa

C. Tingkatan norma

1. Cara (usage): Bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat dan bersifat perorangan
2. Kebiasaan (folkways): Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang dengan cara yang sama
3. Tata kelakuan (mores): Perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia. Dilakukan secara sadar
4. Adat istiadat (custom): Tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara tetap. Berlaku di daerah tertentu saja

D. Arti penting norma

Beberapa arti penting norma adalah menuntun dan memberi pedoman tingkah laku masyarakat, membentuk budi pekerti dan memiliki akhlak mulia, menjadi pembatas perilaku manusia dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan seimbang

E. Perilaku yang sesuai dengan norma

Dalam lingkungan keluarga, perwujudan perilaku yang sesuai dengan norma antara lain menghormati dan membantu orang tua, menaati peraturan yang telah disepakati dalam keluarga, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, dan menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban. Sementara itu, perilaku dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat antara lain dengan saling menghargai dan menghormati orang lain, dapat bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan, memperlakukan orang lain dengan baik, menghindari perbuatan yang melanggar hukum, dan dapat menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan masyarakat dengan kegiatan, seperti melakukan kerja bakti dan Siskamling (sistem keamanan lingkungan)

BAB 3 PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945)

Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang setelah anggotanya bertambah 6 orang, menjadi 27 orang. Pada sidang tersebut, PPKI berhasil menetapkan hal-hal berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan yang di dalamnya memuat rumusan pancasila dan batang tubuh yang merupakan konstitusi tertulis yang singkat dan supel. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan

2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang membantu presiden serta wakil presiden sebelum adanya berbagai lembaga resmi yang diharapkan UUD 1945

B. Arti Penting UUD 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat kaidah negara yang fundamental. Sejatinya, Pembukaan UUD 1945 merupakan penuangan jiwa Pancasila yang mengandung 4 pokok pikiran berikut:

1. Pokok pikiran persatuan, negara kesatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Pokok pikiran keadilan sosial, negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
4. Pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

C. Kedudukan UUD 1945

Undang-undang dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut:

1. Bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia
2. Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati
3. Merupakan sumber hukum tertulis dan tertinggi. Setiap produk hukum dan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan UUD 1945
4. Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945

D. Peran tokoh perumus UUD 1945

Peran tokoh perumus UUD 1945 sangat penting. Mereka memiliki sikap-sikap patriotisme dan nasionalisme yang sangat tinggi dan dijiwai nilai-nilai persatuan dan demokrasi. Tidak hanya itu, mereka juga sangat peduli pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti hak segala bangsa, hak warga negara, dan hak setiap penduduk. Selain itu, dalam setiap pengambilan keputusan, mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi, kecerdasan, dan kecermatan.

